

DETERMINAN KEPUTUSAN PENCARI KERJA DALAM MENCARI KARTU AK/I DI PROVINSI BALI

Ni Wayan Okarianti¹
Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
Email: okarianti621@gmail.com

ABSTRAK

Pendataan ketenagakerjaan yang baik diperlukan oleh suatu daerah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kecenderungan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja di Provinsi Bali serta menganalisis secara simultan dan parsial pengaruh umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden yang diuji dengan metode regresi *binary logistic*. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali dari tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan. Secara simultan, variabel yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali. Secara parsial variabel umur dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali, sedangkan variabel instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali.

Kata kunci: Umur, Pendidikan, Pencari Kerja, Kartu AK/I

ABSTRACT

The data collection of good employment information required by a region to create a better policy in the future. This research has several purposes to analyze the tendency of job seekers in applying AK/I card since it function as an evidence of job seeker's registration in Bali Province, to analyze simultaneously and partially the influence of age, education, institution/company that requires AK/I card, job seeker's knowledge about function of AK/I card to the decision of job seeker in applying this card in Bali Province. This research used 100 respondents and they were examined using binary logistic regression method. Result of the research shows there is a decrease tendency of job seeker in applying for AK/I card in Bali Province from 2014 until 2016. Simultaneously, the variables have significant influence to decision of job seeker in applying for AK/I card in Bali Province. Partially, age and education variables have positive and significant effect to decision of job seeker applying for AK/I card in Bali Province. Meanwhile, the variables such as institution that requires AK/I and the knowledge of job seekers about function of AK/I card have no significant effect to job seeker's decision in applying for AK/I card in Bali Province.

Keywords: Age, Education, Job Seeker, AK/I Card

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang masuk dan dapat diserap oleh pasar kerja yang ada (Marhaeni dkk., 2017). Menurut Kurniawan dan Sulistyaningrum (2017), penyerapan tenaga kerja di Indonesia hanya mencapai 60 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada, sehingga kesempatan kerja dikatakan masih menjadi masalah utama bagi pembangunan ekonomi di Indonesia yang berdampak pada pengangguran yang ada (Cahya Ningsih dan Bagus Indrajaya, 2015).

Tingginya jumlah pengangguran terbuka yang juga merupakan permasalahan utama dihadapi oleh pencari kerja dapat disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan informasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja (Dhanani dan Iyanatul Islam, 2001). Kondisi yang baik adalah jika pencari kerja mengetahui informasi tentang dimana lowongan kerja tersebut berada, dan pemberi kerja mengetahui dimana pencari kerja tersebut dengan kualifikasinya masing-masing, maka pencari kerja akan lebih cepat terserap dan para pemberi kerja akan lebih cepat memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. Perilaku antara pencari kerja dengan pemberi kerja dalam pasar kerja tersebut merupakan analisis ekonomi ketenagakerjaan (Hukom, 2014). Pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi kerja atau permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut disebut pasar kerja. Menurut Dong dan Chris Manning (2017), kondisi pasar kerja Indonesia yang baik adalah kondisi yang mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan aman sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Simanjuntak (2001:101) terdapat 3 pihak yang terlibat dalam pasar kerja yaitu: 1) Penawaran tenaga kerja adalah pihak yang menginginkan pekerjaan atau disebut pencari kerja; 2) Permintaan tenaga kerja adalah pihak yang membutuhkan tenaga kerja atau disebut pengusaha; 3) Perantara atau pihak lain atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan atau membantu untuk mempercepat pertemuan antara pencari kerja dengan para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja.

Pihak perantara dalam hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu departemen tenaga kerja, ataupun pihak swasta lainnya. Departemen/Dinas Tenaga Kerja dalam menjadi perantara wajib mempunyai data yang lengkap mengenai pasar kerja, maka pihak yang menawarkan tenaga kerja dan pihak yang melakukan permintaan tenaga kerja juga wajib melakukan perannya, yaitu bersedia melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja terkait bahwa sedang mencari pekerjaan dan membutuhkan tenaga kerja.

Pelaporan ketenagakerjaan selain untuk menurunkan permasalahan utama dalam bidang ketenagakerjaan yaitu menurunkan pengangguran terbuka, terutama pengangguran friksional, ini penting dilakukan untuk mendata dan mengetahui kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya sehingga para pelaku yang terlibat dalam pasar kerja terutama pemerintah (Dinas Tenaga Kerja) segera dapat mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. Selain itu dengan pendataan tenaga kerja yang baik akan meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan permasalahan ketenagakerjaan sehingga informasi riil kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menjadi valid dan tidak *underestimate*.

Layanan ketenagakerjaan di Indonesia mengeluarkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) atau yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kartu kuning. Kartu ini diwajibkan oleh sejumlah pengusaha tertentu terutama layanan sipil sebagai persyaratan untuk melamar kerja. Layanan ketenagakerjaan umum ini juga memfokuskan upayanya membantu penempatan tenaga kerja di sektor perekonomian formal. Status pekerjaan yang tergolong formal terdiri dari: (1) mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap ; (2) buruh/karyawan (Marhaeni dan Manuati, 2004:78). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pasal 38 ayat (1) menyatakan pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Dinas Kabupaten/Kota atau di kecamatan sesuai domisili untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I).

Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi. Menurut Mantra (2000:230) TPAK memperlihatkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, sehingga dapat diketahui besaran penduduk yang aktif bekerja. Sumber data yang dapat digunakan langsung untuk menganalisa masalah pasar tenaga kerja di Indonesia salah satunya adalah Sakernas (Dong, 2016). Berdasarkan data Sakernas Agustus 2016, tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Bali menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 77,24 persen lebih tinggi daripada angka TPAK nasional sebesar 66,34 persen.

Tabel 1.1 Kondisi Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali Tahun 2016

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk Usia Kerja (orang)	1.595.800	1.593.218	3.189.018
Angkatan Kerja (orang)	1.338.829	1.124.210	2.463.039
Bekerja (orang)	1.309.806	1.106.749	2.416.555
Pengangguran Terbuka (orang)	29.023	17.461	46.484
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83.90	70.56	77.24
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.17	1.55	1.89

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2016*

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya jumlah angkatan kerja/penawaran tenaga kerja di Provinsi Bali Tahun 2016 yaitu sebesar 2.463.039 orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,24 persen. Kondisi ini berarti dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dapat menerangkan bahwa besarnya kesempatan kerja yang tersedia di Provinsi Bali tergolong baik, namun dengan adanya kesempatan kerja yang baik, juga harus diimbangi dengan penempatan kerja yang baik pula. Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga yang berperan dalam pasar kerja sudah selayaknya dapat segera mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia.

Pentingnya kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) bukan saja untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dalam membuat suatu kebijakan dan perencanaan ketenagakerjaan yang lebih baik kedepannya, untuk mengetahui jumlah pencari kerja yang sebenarnya, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pencari kerja (Purnama Sari, 2016). Kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja

(AK/I) juga berguna bagi pencari kerja untuk menyatakan bahwa dirinya sedang mencari pekerjaan dan dengan harapan agar segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, kompetensi, dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Tabel 1.2 Pencari Kerja Yang Terdaftar Mencari Kartu AK/I Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014 – 2016 (orang)

No	Dinas Kab/Kota	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Badung	2,539	2,088	2,650
2	Denpasar	3,301	1,421	1,084
3	Tabanan	2,468	1,195	1,139
4	Jembrana	9,511	4,711	381
5	Buleleng	3,956	1,033	1,183
6	Gianyar	1,356	501	603
7	Klungkung	799	2,386	551
8	Bangli	2,665	2,352	1,736
9	Karangasem	814	912	762
Jumlah		27,409	16,599	10,089

Sumber : *Disnaker Kabupaten/Kota se-Bali, 2014-2016*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja yang mencari kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja di Disnaker Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki jumlah yang bervariasi dan jumlah setiap tahun memiliki kecenderungan mengalami penurunan, hal ini karena dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan termasuk di dalamnya jumlah penduduk yang ada. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dirinya ke Disnaker Kabupaten/Kota untuk mencari kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Umur dari pencari kerja merupakan salah satu faktor yang diperkirakan mempengaruhi keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I. Menurut Meydianawathi (2009), umur dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja, tanggung jawab dan produktivitas seseorang dalam bekerja. Umur juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, kecenderungan seseorang pada umur yang lebih muda umumnya memiliki pola pikir yang dinamis dan kreatif dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan. Perekrutan calon tenaga kerja baik di instansi pemerintahan maupun di perusahaan swasta, batas umur/usia juga biasa digunakan sebagai salah satu syarat untuk dapat memenuhi lowongan kerja yang ada, sehingga dalam hal ini umur diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan dari pencari kerja untuk mencari atau tidak kartu AK/I sebagai kartu pencari kerja.

Pendidikan pencari kerja juga diperkirakan mempengaruhi keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I. Kondisi ini dimungkinkan karena menurut Mandala (2012), tingkat pendidikan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan dan mempertinggi rasionalitas masyarakat. Menurut Seran (2017) pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga dapat menentukan seseorang untuk memilih pekerjaan (Keyfitz, 1989). Kondisi ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Sehingga dapat dikatakan tingkat pendidikan dari pencari kerja dapat mempengaruhi keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I sebagai kartu pencari kerja.

Instansi/Perusahaan mensyaratkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) juga diperkirakan mempengaruhi keputusan pencari kerja untuk mencari kartu (AK/I). Banyaknya berbagai jenis lowongan pekerjaan yang ada tidak semua lowongan mensyaratkan kepada calon tenaga kerjanya untuk melampirkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) sebagai persyaratan kecuali untuk mengikuti test CPNS yang sampai saat ini masih mewajibkan calon tenaga kerjanya melampirkan kartu (AK/I) sebagai pemenuhan persyaratan kerja. Marhaeni dkk., (2017) dalam penelitiannya disampaikan bahwa perusahaan yang mensyaratkan kartu kuning bagi calon karyawan yang melamar pekerjaan di perusahaannya, secara tidak langsung perusahaan sudah berpartisipasi dalam mendorong pencari kerja untuk melaporkan dirinya ke Disnaker melalui pembuatan kartu kuning. Apabila perusahaan yang akan mencari karyawan baru mensyaratkan kartu kuning, maka pencari kerja akan datang ke Disnaker.

Pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu (AK/I) juga diperkirakan mempengaruhi keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja atau (AK/I), karena pada dasarnya fungsi kartu (AK/I) yang tertuang dalam Permenaker RI Nomor 39 Tahun 2016 yaitu sebagai kartu tanda bukti bahwa pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) yang dapat digunakan oleh pelaku pasar kerja untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan

perlindungan hukum, namun informasi ini belum diketahui secara umum oleh masyarakat luas. Penelitian Marhaeni dkk., (2017) juga menyampaikan dari banyaknya jumlah pencari kerja yang terdapat di Provinsi Bali hanya sedikit yang pernah mendengar kartu AK/I atau kartu kuning sebagai kartu tanda bukti pencari kerja. Sehingga pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I juga diperkirakan dapat mempengaruhi keputus pencari kerja untuk mencari atau tidak kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I).

Melihat fakta dilapangan serta penelitian terdahulu dari sekian banyak jumlah pencari kerja di Provinsi Bali hanya sebagian kecil yang mendaftarkan dirinya ke Dinas Tenaga Kerja di wilayah yang bersangkutan untuk mencari kartu AK/I. Melihat kondisi tersebut maka muncul beberapa pertanyaan benarkah analisis faktor-faktor seperti umur, tingkat pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu tanda bukti pendafrtan pencari kerja (AK/I), serta pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I berpengaruh terhadap keputusan angkatan kerja untuk mencari kartu tanda bukti pendafrtan pencari kerja (AK/I).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 1) Bagaimana kecenderungan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja di Provinsi Bali? 2) Apakah umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali? 3) Bagaimana

pengaruh umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I secara parsial terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali?

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan beberapa tujuan penelitian, yaitu. 1) Menganalisis kecenderungan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerjadi Provinsi Bali. 2) Menganalisis secara simultan pengaruh umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pegetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali. 3) Menganalisis secara parsial pengaruh umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pegetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali.

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai pembuktian terhadap teori yang mempengaruhi keputusan pencari kerja dalam mencari (AK/I), sebagai referensi penelitian, dan menambah jurnal yang meneliti tentang determinan keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I). Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam membuat kebijakan tentang penempatan ketenagakerjaan serta membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas data kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya, sehingga dapat segera mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka dapat diajukan hipotesis, yaitu.

- 1) Umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali.
- 2) Umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat asosiatif dan eksploratif yang bertujuan untuk mencari hubungan atau pengaruh dari variabel umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I dan keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali serta bertujuan untuk menjadikan topik baru untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah umur (X_1), pendidikan (X_2), instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I (X_3), dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I (X_4) dengan variabel terikat yaitu keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali (Y). Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, pemilihan lokasi dilakukan karena Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang tinggi berdasarkan data Sakernas Agustus

2016 yaitu mencapai 77,24 persen.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013;115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pencari kerja yang akan bekerja pada sektor perekonomian formal yang menggunakan atau tidak kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja.

Sampel dalam penelitian ini adalah pencari kerja yang mencari kartu AK/I dan yang tidak mencari kartu AK/I di Provinsi Bali. Penentuan jumlah sampel berpedoman pada ketentuan ukuran sampel menurut Roscoe (Sugiyono, 2010:131) dimana dalam penelitian yang akan melakukan analisis dengan *multivariate* maka jumlah sampel yaitu minimal 10 kali jumlah variabel penelitian. Penelitian ini menganalisis 5 variabel, sehingga ukuran sampel minimal 50. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian harus mencerminkan jumlah dari populasi yang ada, maka berdasarkan pertimbangan tertentu, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100, yaitu 10 responden dari masing-masing Kabupaten (Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Jembrana) dan 20 responden dari Kota Denpasar.

Metode penentuan sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013;120) dan *accidental sampling* yaitu penentuan

sampel berdasarkan kebetulan atau insidental pada setiap orang yang ditemui oleh peneliti dengan ketentuan orang tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono 2013;122).

TEKNIK ANALISIS DATA

Model regresi logistik yang digunakan adalah *Binary Logistic* yaitu regresi logistik dengan dua kategori atau binominal pada variabel terikat. Model matematis dari keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) adalah sebagai berikut:

$$PM = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \dots \dots \dots (1)$$

keterangan:

PM : keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali (1 = ya, 0 = tidak)

X₁ : umur

X₂ : pendidikan

X³ : instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I (1 = ya, 0 = tidak)

X₄ : pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I (1 = ya , 0 = tidak)

Binary logistic merupakan bentuk dari probabilitas penjelasan variabel bebas yang dapat menggunakan variabel kontinu, diksrit atau dikotomis (Ghozali, 2006:270). Model ekonometrika dapat dituliskan dalam persamaan berikut:

$$Li = Ln \frac{Pi}{1-Pi} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 \mu_i \dots \dots \dots (2)$$

keterangan :

L_i : keputusan pencari kerja dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) di Provinsi Bali

β_0 : intersep

$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4\beta_5$: parameter

X_1 : umur

X_2 : pendidikan

X_3 : instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I

X_4 : pengetahuan pencari kerja tentang fungsi AK/I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Provinsi Bali

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota dari Provinsi Bali adalah Denpasar. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat $08^{\circ}03'40''$ - $08^{\circ}50'48''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}25'40''$ - $115^{\circ}42'40''$ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai $5.636,66 \text{ km}^2$ atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi kedalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar. Dengan luas wilayah $5.636,66 \text{ km}^2$ kepadatan penduduk di Bali telah mencapai 745 jiwa /km^2 . Selain memiliki kepadatan penduduk yang tinggi Provinsi Bali pada tahun 2016 juga memiliki TPAK (tingkat partisipasi

angkatan kerja) tertinggi sebesar 77,24 persen lebih tinggi dibandingkan tingkat TPAK nasional 66,34 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja di Provinsi Bali tergolong tinggi.

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan pencari kerja yang akan bekerja pada sektor perekonomian formal yang memiliki keputusan mencari atau tidak kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja di Provinsi Bali. Data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, dan wawancara mendalam dengan metode *nonprobability sampling* dan *accidental sampling*. Responden dalam penelitian ini terdapat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 10 responden dari masing-masing Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Jembrana, serta 20 responden dari Kota Denpasar. Selanjutnya akan dipaparkan secara mendetail mengenai karakteristik responden yang mempengaruhi keputusan responden (pencari kerja) dalam mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) berdasarkan umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja AK/I, dan pengetahuan responden (pencari kerja) tentang fungsi kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja.

Tabel 1.3 Distribusi Karakteristik Responden Menurut Umur, Pendidikan, Instansi/Perusahaan Mensyaratkan Kartu AK/I, dan Pengetahuan Pencari Kerja Tentang Fungsi Kartu AK/I

NO	URAIAN		JUMLAH RESPONDEN	
			Satuan	Persentase
			Orang	
1	Kategori Responden Menurut Umur	15-19 tahun	5	5,0
		20-24 tahun	28	28,0
		25-29 tahun	19	19,0
		30-34 tahun	21	21,0
		35-39 tahun	11	11,0
		40-44 tahun	8	8,0
		45-49 tahun	4	4,0
		50-54 tahun	3	3,0
	55-59 tahun	1	1,0	
Jumlah		100	100	
2	Kategori Responden Menurut Pendidikan	SLTA (12 tahun)	60	60,0
		S1 (15,5-17 tahun)	36	36,0
		Pasca Sarjana (19-20 tahun)	4	4,0
	Jumlah		100	100
3	Kategori Responden Menurut Instansi/Perusahaan Mensyaratkan Kartu AK/I	Ya	44	44,0
		Tidak	56	56,0
	Jumlah		100	100
4	Kategori Responden Menurut Pengetahuan Pencari Kerja Tentang Fungsi Kartu AK/I	Ya	42	42,0
		Tidak	58	58,0
	Jumlah		100	100

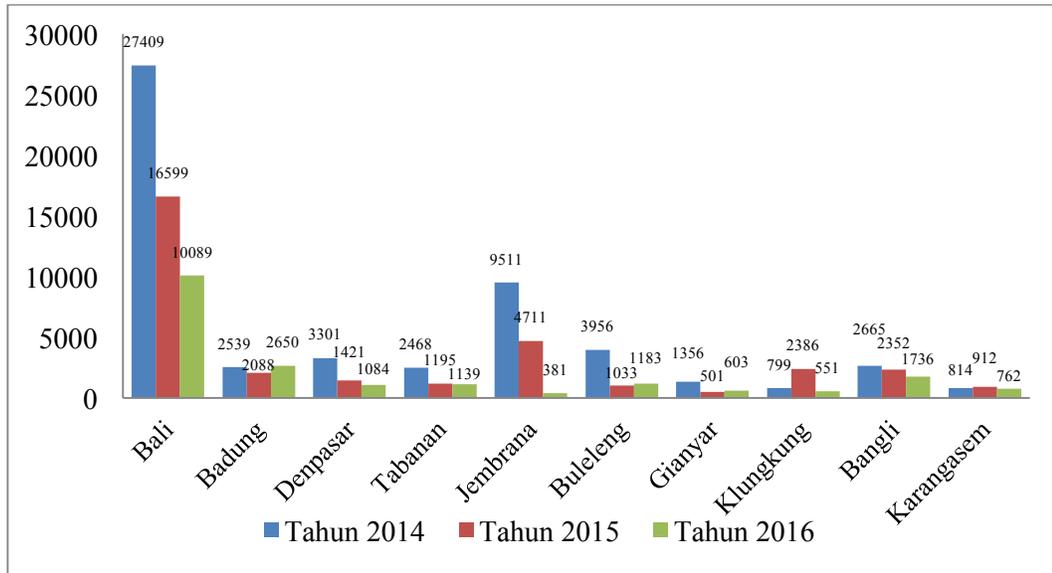
Sumber: data hasil penelitian, 2016

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kelompok umur penacri kerja yang lebih banyak mencari kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) adalah pada rentangan uur 20 tahun sampai 39 tahun, karena pada rentangan umur tersebutsebagian besar penduduk usia kerja sudah menyelesaikan pendidikannya dan

dituntut untuk bekerja. Berdasarkan pendidikan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan tahun sukses 12 tahun (SLTA) memiliki partisipasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 60 persen dalam mencari kartu AK/I, karena lebih memerlukan bantuan dari Disnaker untuk segera mempertemukan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Dilihat dari instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, menunjukkan bahwa sebagian besar instansi/perusahaan tidak mensyaratkan kartu AK/I yaitu sebesar 56 persen. Berdasarkan Pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari pencari kerja tidak mengetahui tentang fungsi kartu AK/I yaitu mencapai 58 persen.

Kecenderungan Pencari Kerja Dalam Mencari Kartu AK/I di Provinsi Bali

Jumlah pencari kerja yang terdaftar mencari kartu AK/I menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2014-2016, sebagaimana tercermin pada Gambar 1.1, menunjukkan jumlah yang bervariasi dan cenderung mengalami penurunan. Hanya di beberapa kabupaten mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan yaitu Kabupaten Karangasem, Klungkung, Gianyar, Buleleng, dan Badung. Secara keseluruhan, total jumlah pencari kerja yang terdaftar mencari kartu AK/I di Provinsi Bali dalam rentang waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 27.409 orang menurun 39,4 persen menjadi 16.599 orang pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 39,2 persen menjadi 10.089 orang.



Sumber: *Disnaker Kabupaten/Kota se-Bali, 2014-2016*

Gambar 1.1 Pencari Kerja Yang Terdaftar Mencari Kartu AK/I Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2016 (orang)

Kecenderungan menurunnya jumlah pencari kerja yang terdaftar mencari kartu AK/I di Provinsi Bali dipengaruhi oleh semakin rendahnya jumlah lowongan kerja yang mensyaratkan kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja dan sebagian besar dari pencari kerja juga tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang adanya dan manfaat dari kartu AK/I.

Pengujian Model Fit

Untuk menilai kelayakan model digunakan.

(1) *Hosmer and Lemeshow's*

Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H_0 : Tidak adanya perbedaan antara model dengan data yang diamati

H_1 : Ada perbedaan antara model dengan data yang diamati

Nilai *Hosmer and Lemeshow's* jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit* model tidak baik karena tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai *Statistics Hosmer and Lemeshow's* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Berikut adalah Tabel 1.4 *Hosmer and Lemeshow's Test* untuk pengujian model fit.

Tabel 1.4 *Hosmer and Lemeshow Test*

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	2.696	8	.952

Sumber: *hasil olah data, 2018*

Uji *chi-square Hosmer and Lemeshow's* digunakan untuk menilai kelayakan model regresi dalam memprediksi suatu data. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh nilai *chi-square* sebesar 2,696 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,952 yang nilainya lebih besar dibandingkan *level of significant* sebesar 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima. Hal ini berarti bahwa tidak adanya perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Sehingga model regresi logistik yang digunakan sudah dapat menjelaskan data dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

(2) *Nagelkerke R Square*

Nilai *Nagelkerke R Square* dapat di interpretasikan seperti nilai *R Square* pada *multiple regression* yang dapat dilihat pada Tabel 1.5 *Model Summary*.

Tabel 1.5 Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	24.320 ^a	.679	.907

Sumber: *hasil olah data, 2018*

Dilihat pada Tabel 1.5 nilai R^2 (*Nagelkerke R Square*) sebesar 0,907 berarti 90,7 persen keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja di Provinsi Bali dipengaruhi oleh variabel umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I serta sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam model.

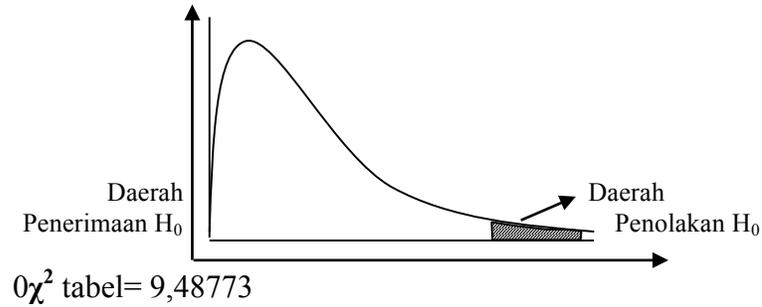
Pengaruh simultan variabel umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali

Pengujian ini bertujuan untuk menguji signifikansi variabel bebas yang secara serempak mempengaruhi keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali yang ditunjukkan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	113.668	4	.000
	Block	113.668	4	.000
	Model	113.668	4	.000

Sumber: *hasil olah data, 2018*



Sumber : Gujarati (1999:75)

Gambar 1.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H₀ dengan Uji Chi-square

Nilai χ^2 hitung = 113,668 > χ^2 tabel = 9,48773, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya variabel umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I secara simultan berpengaruh terhadap variabel keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali.

Pengaruh secara parsial variabel umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali, sedangkan variabel bebas yaitu: umur (X₁), pendidikan (X₂), instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I (X₃), dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I (X₄).

Tabel 1.7 Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	X1	.216	.101	4.624	1	.032	1.242	1.019	1.512
	X2	.680	.338	4.059	1	.044	1.974	1.019	3.826
	X3	45.626	6813.570	.000	1	.995	6534440045000 0000000.000	.000	.
	X4	20.719	4542.610	.000	1	.996	995600067.900	.000	.
	Constant	-38.343	4542.618	.000	1	.993	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4.

Sumber : *hasil olah data, 2018*

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dapat dilihat pada hasil regresi dengan memperhatikan nilai dari *sig* serta arah positif atau negatif dari nilai B. Bentuk persamaan regresi dilihat dari Tabel 4.8 adalah sebagai berikut:

$$Li = \ln \frac{Pi}{1-Pi} = -38,343 + 0,216X_1 + 0,680X_2 + 45,626X_3 + 20,719X_4 \dots \dots \dots (3)$$

- Li : keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I
- 30,343 : intersep
- 0,216X₁ : parameter umur
- 0,680X₂ : parameter pendidikan
- 45,626X₃ : parameter instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I
- 20,719X₄ : parameter pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I

Interprestasi :

(1) Umur

Nilai β_1 pada Tabel 4.8 adalah sebesar 0,216 artinya apabila umur pencari kerja bertambah satu tahun dengan catatan variabel lain konstan maka probabilitas pencari kerja untuk memutuskan mencari kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 55,4 persen. Menurut Yamin dan Kurniawan, (2009 : 101), hasil tersebut diperoleh dengan rumus $(\frac{1}{1+e^{-0,216}})$ dan pengaruh variabel umur terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali yaitu H_0 ditolak karena p-value = 0,032 kurang dari 0,05 berarti variabel umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali. Penelitian Astika Sari (2017) juga menyampaikan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi

berada dalam kelompok umur 22-25 tahun yang tergolong penduduk usia produktif. Hasil tersebut didukung oleh pendapat Sagung Trisna yang merupakan staf bidang Pentuluas Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Tabanan, saat diwawancara mendalam pada tanggal 8 Pebruari 2018 di kantor Disnake-trans Kabupaten Tabanan berpendapat bahwa.

Jumlah masyarakat yang mencari kartu AK/I di Kabupaten Tabanan adalah sebagian besar berumur 18-35 tahun dimana mereka baru menyelesaikan pendidikannya dan ingin segera bekerja, selain memang benar umur 18-35 tahun tersebut merupakan usia produktif untuk mereka bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan pada rentangan umur tersebut memang masyarakat atau generasi muda dituntut untuk bekerja sebagai bekal untuk kedepannya. Oleh karena itu kebanyakan umur 18-35 tahun yang mencari kartu AK/I kesini.

(2) Pendidikan

Nilai β_2 pada Tabel 4.8 adalah sebesar 0,680 artinya apabila waktu yang ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan atau tahun sukses pendidikan pencari kerja lebih tinggi satu tahun sukses, dengan catatan variabel lain konstan maka probabilitas pencari kerja untuk memutuskan untuk mencari kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja di Provinsi Bali akan meningkat sebesar 66,4 persen. Menurut Yamin dan Kurniawan, (2009 : 101), hasil tersebut diperoleh dengan rumus $(\frac{1}{1+e^{-0,680}})$ dan pengaruh variabel umur terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali yaitu H_0 ditolak karena p-value = 0,044 kurang dari 0,05 berarti variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali. Penelitian Tarigan (2006), pendidikan diyakini sangat berpengaruh terhadap tingkah laku,

kecakapan, dan sikap seseorang. Mapparenta (2010) dalam penelitiannya juga menyatakan pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan dan mempertinggi rasa rasionalitas masyarakat. Hasil tersebut didukung oleh pendapat Kadek Aristya Budi salah satu pencari kerja yang pernah mencari kartu AK/I di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, saat wawancara mendalam pada tanggal 20 Maret 2018 di Desa Bengkel, Selemadeg Barat, Tabanan berpendapat bahwa.

Sebagai tenaga kerja yang berlatar belakang dari perguruan tinggi negeri, saya ingin mendapat pekerjaan yang bagus, yang memiliki prestis yang tinggi di masyarakat. Karena itu saya mencari kartu AK/I sebagai kartu pencari kerja. Yang saya ketahui kartu AK/I itu memfokuskan penyaluran tenaga kerja di sektor formal, hal itu sesuai dengan keinginan saya yang bekerja di sektor formal juga, itulah yang mendorong saya mencari kartu AK/I.

(3) Instansi/Perusahaan Mensyaratkan Kartu AK/I

Nilai β_3 pada Tabel 4.8 adalah sebesar 45,626 tidak memiliki nilai apa-apa. Dikarenakan variabel instansi/perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali menerima H_0 , dan menunjukkan $p\text{-value} = 0,995$ lebih besar dari 0,05 berarti variabel instansi/perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali. Hasil tersebut dikarenakan masih sedikitnya instansi/perusahaan yang bergelut di sektor perekonomian formal di Provinsi Bali yang mensyaratkan kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja kepada calon tenaga kerjanya. Marhaeni dkk., (2017) disampaikan bahwa banyak instansi/perusahaan yang tidak mensyaratkan kartu kuning/kartu AK/I

pada saat mencari tenaga kerja yang baru, hal tersebut disampaikan karena ada beberapa alasan yang mempengaruhi diantaranya perusahaan masih relative kecil sehingga sepertinya belum diperlukan, dan beberapa perusahaan juga menyampaikan belum paham tentang manfaat kartu kuning atau kartu AK/I. Heckman, *et.al* (2006), dalam penelitiannya menyatakan sebagian besar bukti bahwa pengusaha di pasar tenaga kerja rendah menghargai ketaatan, ketergantungan, dan ketekunan dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri.

Hasil tersebut didukung oleh pendapat Made Reta selaku staf Penempatan, Pelatihan, dan Penyaluran Tenaga Kerja Kabupaten Badung, saat diwawancara di kantornya pada tanggal 7 Pebruari 2018 menyampaikan bahwa.

Sebagian besar dari perusahaan yang bergelut di sektor perekonomian formal yang terdapat di Kabupaten Badung sudah melaporkan lowongannya sesuai dengan UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980 tentang AK/III, tetapi perusahaan tersebut tidak mensyaratkan kartu AK/I kepada calon tenaga kerjanya. Karena dalam peraturan yang baru yaitu UU Nomor 2003 perusahaan tidak diwajibkan dalam merekrut karyawan mensyaratkan kartu AK/I atau dengan kata lain perusahaan dapat melakukan rekrut tenaga kerja sendiri, terkecuali mereka yang akan bekerja di luar negeri wajib mencari kartu AK/I ke Dinas Tenaga Kerja sebagai persyaratan untuk dapat membuat paspor dan tujuan dari pemerintah terhadap hal ini adalah untuk mengatasi terjadinya TKI illegal.

(4) Pengetahuan Pencari Kerja Tentang Fungsi Kartu AK/I

Nilai β_4 pada Tabel 4.8 adalah sebesar 20,719 tidak memiliki nilai apa-apa. Dikarenakan variabel pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali yaitu menerima H_0 dan $p\text{-value} = 0,996$ lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel pengetahuan

pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali. Hasil ini didukung oleh kurangnya informasi yang diterima oleh pencari kerja tentang adanya kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja. Hasil ini sesuai dengan penelitian Marhaeni dkk., (2017) yang berjudul “Kondisi Pasar Kerja di Provinsi Bali: Implementasi UU Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan” menunjukkan hasil bahwa dari 100 persen responden, hanya 42 persen yang pernah mendengar tentang kartu AK/I atau kartu kuning, hal ini berarti bahwa sebagian besar dari responden tidak pernah mendengar tentang kartu AK/I.

Menurut Manila Ayupijaya selaku pejabat Fungsional Pengantar Kerja Madya di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali saat diwawancara mendalam tanggal 9 Februari 2018 di ruangan kerjanya, menyampaikan bahwa.

Memang benar bahwa sebagian besar dari masyarakat tidak mengetahui tentang fungsi kartu AK/I. Pemerintah selama ini sudah mensosialisasikan tentang adanya kartu AK/I, namun sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pameran kesempatan kerja (*job fair*), *job vacancy* atau kegiatan lainnya. Minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang kartu AK/I, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dan belum adanya anggaran khusus yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan tentang adanya kartu AK/I ke masyarakat luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

- 1) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Disnaker tingkat perkembangan pencari kerja menurut kabupaten/kota dilihat dari jumlah pencari kartu AK/I di Provinsi Bali kondisinya berfluktuasi ada yang mengalami kenaikan dan penurunan, namun dari jumlah keseluruhan di Provinsi Bali memiliki kecenderungan mengalami penurunan. Selain itu informasi yang diperoleh dari pencari kerja lebih banyak dari mereka (sekitar 58 persen) tidak pernah mendengar dan tahu tentang fungsi kartu AK/I, artinya mereka tidak pernah mencari kartu AK/I, dan makna selanjutnya mereka tidak pernah terdata sebagai pencari kerja. Berdasarkan informasi dari Disnaker tentang perusahaan, bahwa tidak semua perusahaan mensyaratkan kartu AK/I dalam mencari karyawan baru. Kondisi ini juga mencerminkan tidak semua pencari kerja mencari kartu AK/I yang berarti juga tidak semua pencari kerja terdata di Disnaker.
- 2) Variabel umur, pendidikan, instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I, dan pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali.
- 3) Secara parsial variabel umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali sebesar 0,032. Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali sebesar 0,044. Variabel instansi/perusahaan mensyaratkan kartu AK/I tidak

berpengaruh terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali sebesar 0,995. Variabel pengetahuan pencari kerja tentang fungsi kartu AK/I tidak berpengaruh terhadap keputusan pencari kerja dalam mencari kartu AK/I di Provinsi Bali sebesar 0,996.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini.

- 1) Pemerintah sebaiknya dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang tamatannya langsung menghasilkan tenaga kerja yang siap terjun ke dunia kerja (SMK, Universitas) untuk mensosialisasikan tentang adanya dan manfaat dari kartu AK/I yang berguna sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja, sehingga lebih banyak masyarakat yang mencari kartu AK/I dan secara otomatis jumlah pencari kerja yang terdapat di Provinsi Bali akan terdata dengan baik.
- 2) Adanya program pemerintah seperti pameran kesempatan kerja (*job fair*) yang banyak menyediakan lowongan kerja, seharusnya dapat dijadikan sebagai wadah untuk mensyaratkan kartu AK/I sebagai salah satu persyaratan kerja. Tujuannya agar para pencari kerja mencari kartu AK/I ke Disnaker kabupaten/kota bersangkutan, sehingga hal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendata jumlah pencari kerja yang sebenarnya, meningkatkan kuantitas dan kualitas pendaataan

ketenagakerjaan yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam membuat suatu kebijakan.

- 3) Sosialisasi dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja melalui iklan, informasi bursa kerja, ataupun program khusus lainnya yang bertujuan untuk mendesiminasi informasi melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) tentang manfaat dan fungsi kartu AK/I sebagai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja. Sosialisai ini sangat penting serta bermanfaat bagi pencari kerja, instansi/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja (pihak yang terlibat dalam pasar kerja) sehingga KAP (*Knowledge, Attitude, dan Practice*) mereka akan dapat ditingkatkan, sehingga undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dan peran Disnaker sebagai perantara di pasar kerja dapat terealisasi dengan lebih efektif.

REFERENSI

Astika Sari, Ni Putu Yuni. 2017. Pengaruh Status Sosial dan Physical Appearance Terhadap Lamanya Waktu Tunggu Mencari Kerja Pertama Kali Bagi Angkatan Kerja Sektor Formal di Kota Denpasar. *Skripsi* Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2016. Bali Dalam Angka 2016. Denpasar.

----- . 2017. Sakernas Agustus 2016. Jakarta.

- Cahya Ningsih, Ni Made dan I Gst Bagus Indrajaya, 2015. Pengaruh Modal Dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8 (1). Hal. 83-91.
- Dhanani, Shafiq and Iyanatul Islam. 2001. Labour Market Adjustment To Indonesia's Economic Crisis: A Comment. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, (37)1: pp 113-15
- Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. 2016. Laporan Pengelolaan Pasar Kerja Provinsi Bali Bulan Desember 2016. Denpasar.
- Dong, Sarah Xue. 2016. Consistency Between Sakernas and The IFLS for Analyses of Indonesia's Labour Market : A Cross Validation Exercise. *Journal Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 52(3), pp:343-378.
- Dong, Sarah Xue and Chris Manning. 2017. Labour Market Developments at a Time of Heightened Uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(1), pp: 1-25.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Heckman, James J., Jora Stixrud, and Sergio Urzua. 2006. The Effects Of Cognitive And Noncognitive Abilities On Labor Market Outcomes And Social Behavior. *National Bureau Of Economic Research*, Paper No. 12006, pp 2-34
- Hukom, Alexandra. 2014. Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), hal. 120-129.
- Keyfitz, Nathan. 1989. Putting Trained Labour Power to Work: The Dilemma of Education and Employment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 25(3), pp: 35-55.

- Kurniawan, Septyono dan Eny Sulistyaningrum, 2017. Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 (2), hal. 193-215.
- Mandala, Ardy. 2012. Peran Pendidikan, Pengalaman, dan Inovasi Terhadap Produktivitas Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Usaha Kecil Menengah Bidang Fashion dan Kerajinan Tangan Batik di Kota Semarang). *Skripsi Sarjana Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Mantra, IB. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mapparenta. 2010. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Economic Resources*, 11(30), hal. 15-24.
- Marhaeni, A.A.I.N. dan I G.A Manuati Dewi, 2004, *Bahan Ajar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Marhaeni,A.A.I.N, I Ketut Sudibia, I.G.W Murjana Yasa, Ni Nyoman Yuliarmi dan Ni Putu Martini Dewi, 2017. Kondisi Pasar Kerja di Provinsi Bali:Implementasi UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 22 (2), hal. 175-186.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Kerja*. Jakarta.
- Meydianawathi, Luh Gede. 2009. Kajian Aktivitas Ekonomi, Buruh Angkut di Pasar Badung. *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 7(1), hal. 20-27.
- Purnama Sari, Nindy. 2016. Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal : Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1) hal. 28-36.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 (1) hal. 59-71.

Simanjuntak, Pjaman. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI

Sugiyono. 2010. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta

----- . 2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Tarigan, Robinson. 2006. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pendapatan Perbandingan antar Empat Hasil Penelitian. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Sumatera Utara*.

Yamin, Sofyan. Heri Kurniawan. 2009. *SPSS Complete (Teknik Analisis Statistik Terlengkap Dengan Software SPSS)*. Jakarta Selatan : Salemba Infotek.